



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 467 SURAKARTA 57146  
TELEPON : 0271-711261, FAKSIMILE : 0271-710648, SMS CENTER : 085328134555  
WEBSITE : [www.kppnsurakarta.net](http://www.kppnsurakarta.net) , E-mail : [kppn028@gmail.com](mailto:kppn028@gmail.com)

Nomor : S-418/WPB.14/KP.0302/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 2 (dua) set  
Hal : Pelaksanaan pembayaran gaji  
menggunakan **database** gaji terpusat .

12 Maret 2018

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran  
Satker Wilayah Pembayaran  
KPPN Surakarta

Dalam rangka efektifitas dalam pembayaran gaji pegawai yang akuntabel dan penggunaan database gaji terintegrasi serta, memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal tersebut diatas perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengujian dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji menggunakan database gaji terpusat dilakukan oleh sistem aplikasi gaji KPPN, antara lain meliputi :
  - a. Validasi dan pengujian gaji dengan gaji bulan sebelumnya;
  - b. Pengujian NIP/NRP ganda untuk mencegah pembayaran ganda.
2. Apabila dalam penyampaian ADK gaji dari Satker terdapat ketidaksesuaian/penolakan, KPPN akan menginformasikan penolakan ADK Gaji kepada Satker untuk dilakukan perbaikan.
3. Apabila ketidaksesuaian dimaksud angka (1) terdapat NIP/NRP ganda Satker agar segera melakukan :
  - a. Mereview dan/atau memperbaiki data NIP/NRP pegawai yang bersangkutan sesuai keputusan kepegawaian (SK PNS/calon PNS, pengangkatan anggota Polri/prajurit TNI, atau kenaikan pangkat terakhir);
  - b. Mengajukan perbaikan ADK Gaji dan perubahan data supplier, apabila terdapat perbaikan NIP/NRP; dan
  - c. Menyampaikan ADK Gaji yang telah diperbaiki kepada KPPN dengan disertai surat pernyataan sesuai format sebagaimana Lampiran I Perdirjen Nomor PER-2/PB/2018 (terlampir) dan dilampiri fotokopi keputusan kepegawaian.
4. Dalam hal terdapat pegawai yang dipindahtugaskan ke satker lain atau diberhentikan sebagai PNS/calon PNS, anggota Polri atau prajurit TNI dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun, KPA menerbitkan dan menandatangani SKPP dengan mencantumkan kode satker asal dan/atau kode satker tujuan dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana lampiran II Perdirjen Nomor-2/PB/2018 dan dapat diunduh melalui website KPPN Surakarta.

Demikian disampaikan, agar dipedomani dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Sugiarso  
NIP 19640712 198503 1 005

Tembusan  
Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

**KOP SURAT SATUAN KERJA**

SURAT PERNYATAAN  
Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

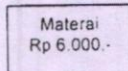
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran .....

Sehubungan dengan pengajuan SPM LS Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan\*) bulan ....., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data PNS/Anggota Polri/Prajurit TNI\* telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepegawaian sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam hal data PNS/Anggota Polri/Prajurit TNI\*) tersebut tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, kami bertanggung jawab dan bersedia untuk menyetor ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....  
Kuasa Pengguna Anggaran.....



.....  
NIP/NRP.....

\*) Pili salah satu

Cp

Lampiran Surat Pernyataan KPA Satker ....  
 Nomor: .....  
 Tanggal: .....

**DATA PEGAWAI YANG NIP/NRP-NYA GANDA**

NO	NAMA PNS/ANGGOTA POLRI/PRA-JURIT TNI	NIP/NRP		SESUAI/TIDAK SESUAI	DOKUMEN KEPEGAWAIAN *) NOMOR SURAT KEPUTUSAN TANGGAL
		SEMULA	MENJADI		
1					
2					
3					
4					
5					
Dst...					

\*) *Fotokopi surat keputusan kepegawaian harus dilampirkan*

Kuasa Pengguna Anggaran .....

NIP/NRP .....

DIREKTOR JENDERAL PERBENDAHARAAN,  
 KEMENTERIAN KEANGGARAN REPUBLIK INDONESIA

*Harjowiryo*

DIREKTOR JENDERAL PERBENDAHARAAN,  
 KEMENTERIAN KEANGGARAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 2  
/PB/2018 PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI  
MENGUNAKAN DATABASE GAJI TERPUSAT

FORMAT SKPP

1. FORMAT SKPP PINDAH PNS
2. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS/CALON PNS
3. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS/CALON PNS
4. FORMAT SKPP PENSIUN PNS
5. FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI
6. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI
7. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI
8. FORMAT SKPP PENSIUN ANGGOTA POLRI
9. FORMAT SKPP PINDAH PRAJURIT TNI
10. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI
11. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI
12. FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI

1. FORMAT SKPP PINDAH PNS

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)</b>		Nomor :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala .....		Lampiran :	
menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:		
NIP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Gaji Pokok		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Istri / Suami		Potongan Beras	
Tunjangan Anak		PPH Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Khusus Papua		TGR	
Tunjangan Struktural		Potongan Lain	
Tunjangan Fungsional			
Tunjangan Lainnya			
Pembulatan		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	
Tunjangan Pajak		<b>JUMLAH BERSIH</b>	
<b>JUMLAH KOTOR</b>			
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Uang Makan Terakhir			
.....			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
.....			
Dibayarkan Uang Muka			
Gaji Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung

<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b>	..... 20.....
1. KPA ..... (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN ..... sebagai pertinggal	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....
	Nama NIP/NRP
	Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN .....
	Nama NIP

04

2. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)</b>		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:	....., dkk (.... orang)	
NRP	:	Terlampir	
Tempat Lahir	:	Terlampir	
Tanggal Lahir	:	Terlampir	
Golongan / Pangkat	:	Terlampir	
Jabatan	:	Terlampir	
Satker dan Kode Satker	:	.....	
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:	.....	
Tanggal SK	:	.....	
Nomor SK	:	.....	
<b>Dipindahkan ke</b>			
Satker dan Kode Satker	:	.....	
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Terlampir		Terlampir	
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			
Dibayarkan Uang Muka Gaji			
Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			
<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b>		..... 20.....	
1. KPA ..... (Satker Baru)		Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala...	
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal			
3. KPPN ..... sebagai pertinggal			
		Nama NIP/NRP	
		Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....	
		Nama NIP	

4



4. FORMAT SKPP PENSIUN PNS

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PENSIUN)</b>		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:		
NIP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Diberhentikan sebagai PNS	:		
Terhitung Mulai Tanggal	:		
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Gaji Pokok		Gaji Wajib Pegawai	
Tunjangan Istri / Suami		Potongan Beras	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Khusus Papua		TGR	
Tunjangan Struktural		Potongan Lainnya	
Tunjangan Fungsional			
Tunjangan Lainnya			
Pembulatan		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	
Tunjangan PPh Pasal 21		<b>JUMLAH BERSIH</b>	
<b>JUMLAH KOTOR</b>			
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Uang Makan Terakhir .....			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN DALAM DAFTAR GAJI		
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir

<p><b>DISAMPAIKAN KEPADA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Taspen (Persero)/ PT. ASABRI (Persero) Cabang .....</li> <li>2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal</li> <li>3. KPPN sebagai pertinggal</li> </ol>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....</p>  <p>Nama NIP/NRP</p>  <p>Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN .....</p>  <p>Nama NIP</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI

<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)</b>		Nomor :	
(Nama Satker)	Lampiran :		
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPH Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk/Fung.		TGR	
Tunjangan Polwan		Potongan Lain	
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Lainnya		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	
Pembulatan		<b>JUMLAH BERSIH</b>	
Tunjangan Pajak			
Penghasilan			
<b>JUMLAH KOTOR</b>			
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			

9

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung

<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b> 1. KPA ..... (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN ..... sebagai pertinggal	..... 20..... Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....  Nama NRP/NIP  Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN .....
	Nama NIP

9

6. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)</b>	Nomor :
		Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala ..... menerangkan bahwa:		
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>		
Nama Pegawai	:	....., dkk (..... orang)
NRP	:	Terlampir
Tempat Lahir	:	Terlampir
Tanggal Lahir	:	Terlampir
Golongan / Pangkat	:	Terlampir
Jabatan	:	Terlampir
Satker dan Kode Satker	:	.....
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>		
SK Dari	:	.....
Tanggal SK	:	.....
Nomor SK	:	.....
<b>Dipindahkan sebagai</b>		
Jabatan	:	.....
Satker dan Kode Satker	:	.....
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>		
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>
Terlampir		Terlampir
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>		
Gaji 13 Terakhir Tahun .....		
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp .....		
Nomor SP2D .....		
Tanggal SP2D .....		
<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b>		..... 20.....
1. KPA ..... (Satker Baru)		Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal		
3. KPPN ..... sebagai pertinggal		
		Nama NRP/NIP
		Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....
		Nama NIP

4



8. FORMAT SKPP PENSIUN ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PENSIUN)</b>		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Diberhentikan sebagai Anggota Polri Terhitung Mulai Tanggal			
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPH Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk/Fung.		TGR	
Tunjangan Polwan		Potongan Lain	
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Lainnya		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	
Pembulatan		<b>JUMLAH BERSIH</b>	
Tunjangan Pajak Penghasilan			
<b>JUMLAH KOTOR</b>			
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			

3

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN DALAM DAFTAR GAJI		
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir

<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b>  1. PT. ASABRI (Persero) Cabang ..... 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....   Nama NRP/NIP   Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN .....
	Nama NIP

04

9. FORMAT SKPP PINDAH PRAJURIT TNI

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)</b>		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai			
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPH Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk/Fung.		TGR	
Tunjangan Kowan		Potongan Lain	
Tunjangan Babinsa			
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Papua			
Tunjangan Pencil			
Tunjangan P. Terluar			
Tunjangan Terampil			
Tunjangan Lainnya		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	
Pembulatan		<b>JUMLAH BERSIH</b>	
Tunjangan Pajak Penghasilan			
<b>JUMLAH KOTOR</b>			
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung

<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b> 1. KPA ..... (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN ..... sebagai pertinggal	..... 20..... Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....
	Nama NRP/NIP  Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN .....
	Nama NIP

4

10. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)</b>		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:	.....	dkk (.... orang)
NRP	:	Terlampir	
Tempat Lahir	:	Terlampir	
Tanggal Lahir	:	Terlampir	
Golongan / Pangkat	:	Terlampir	
Jabatan	:	Terlampir	
Satker dan Kode Satker	:	.....	
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:	.....	
Tanggal SK	:	.....	
Nomor SK	:	.....	
<b>Dipindahkan ke</b>			
Satker dan Kode Satker	:	.....	
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Terlampir		Terlampir	
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			
Dibayarkan Uang Muka Gaji			
Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			
<b>DISAMPAIKAN KEPADA</b>		..... 20.....	
1. KPA ..... (Satker Baru)		Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....	
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal		Nama	
3. KPPN ..... sebagai pertinggal		NRP/NIP	
		Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....	
		Nama	
		NIP	

24



12. FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI

(Nama Satker)	<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)</b>		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala ..... menerangkan bahwa:			
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
<b>BERDASAR SURAT KEPUTUSAN</b>			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Diberhentikan sebagai Prajurit TNI Terhitung Mulai Tanggal	:		
<b>SAMPAI DENGAN BULAN ..... TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :</b>			
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk / Fung		TGR	
Tunjangan Kowan		Potongan Lain	
Tunjangan Babinsa			
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Papua			
Tunjangan Pencil			
Tunjangan P. Terluar			
Tunjangan Terampil			
Tunjangan Lainnya		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	
Pembulatan		<b>JUMLAH BERSIH</b>	
Tunjangan Pajak Penghasilan			
<b>JUMLAH KOTOR</b>			
<b>PEMBAYARAN LAINNYA</b>			
Gaji 13 Terakhir Tahun .....			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp .....			
Nomor SP2D .....			
Tanggal SP2D .....			

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN DALAM DAFTAR GAJI		
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir

<p><b>DISAMPAIKAN KEPADA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. ASABRI (Persero) Cabang .....</li> <li>2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal</li> <li>3. KPPN sebagai pertinggal</li> </ol>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala .....</p> <p>Nama NRP/NIP</p> <p>Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN .....</p> <p>Nama NIP</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,  
*(Signature)*  
 M. MARWAN HARJOWIRYONO